Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Kiprah Perempuan dalam Perang Belasting: Historiografi Perlawanan Siti Manggopoh di Nagari Manggopoh 1908

Rahmah Istiqomah
UIN Sunan Ampel Surabaya
03020224054@uinsa.ac.id
Aisyah Fadhila Rahmi
UIN Sunan Ampel Surabaya
03010224067@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kiprah Siti Manggopoh dalam Perang Belasting di Nagari Manggopoh pada 1908 serta representasinya dalam historiografi. Penelitian ini berawal dari persoalan bagaimana keterlibatan perempuan dalam perlawanan terhadap kolonialisme direpresentasikan dalam penulisan sejarah. Tujuan penelitian adalah merekonstruksi peran Siti Manggopoh dalam perlawanan terhadap kebijakan pajak kolonial Belanda dan menganalisis representasinya dalam berbagai sumber sejarah. Studi ini menerapkan pendekatan sejarah-politik berbasis teori kekuasaan dan dominasi milik Max Weber, dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, serta historiografi. Analisis dilakukan dengan menelaah arsip sejarah dari website *delpher* dan artikel online yang berkaitan dengan Perang Belasting dan kiprah Siti Manggopoh. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan Siti Manggopoh tidak terbatas pada pertempuran, tetapi juga mencakup persiapan perlawanan, pengorganisasian pejuang, dan pengumpulan informasi mengenai kekuatan kolonial. Penelitian ini juga menelaah bagaimana kiprah Siti Manggopoh direpresentasikan dalam sumber sejarah yang berbeda serta bagaimana penulisan sejarah menempatkan perempuan dalam narasi perlawanan terhadap kolonialisme.

Kata Kunci: *Siti Manggopoh; Perang Belasting; Historiografi Tokoh Perempuan*.

PENDAHULUAN

Belasting merupakan kebijakan pajak kolonial yang mulai diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1 Maret 1908 dan memicu perlawanan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Salah satu hal yang melatarbelakangi penolakan tersebut ialah Plakat Panjang yang diumumkan pada 25 Oktober 1833 setelah Perang Padri. Melalui Plakat Panjang, Belanda menyampaikan sejumlah pernyataan mengenai hubungan pemerintahan kolonial dengan masyarakat setempat, termasuk komitmen untuk tidak membebani penduduk dengan pungutan tertentu (Masyitah et al., 2019).

Pemerintah kolonial juga mendorong masyarakat untuk mengembangkan pertanian, terutama penanaman kopi, yang kemudian menjadi salah satu komoditas penting di wilayah tersebut. Namun, ketika pemerintah Hindia Belanda memberlakukan belasting pada 1 Maret 1908, kebijakan pajak tersebut dipandang oleh sebagian masyarakat Minangkabau sebagai tindakan yang bertentangan dengan harapan yang terbentuk dari Plakat Panjang. Pemberlakuan pajak atas tanah, hasil usaha, dan sumber penghidupan masyarakat dianggap menambah beban ekonomi sekaligus memperlihatkan perubahan sikap pemerintah kolonial terhadap komitmen sebelumnya (Masyitah et al., 2019).

Penerapan *belasting* juga berkaitan dengan kebutuhan keuangan pemerintah kolonial Belanda. Setelah penghapusan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) pada 1870, Belanda tetap membutuhkan sumber pendapatan untuk membayar utang, membiayai pembangunan, serta mendukung operasi militer dalam Perang Aceh (1873–1904). Pemerintah kolonial juga menjalankan Politik Etis pada 1901 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Pelaksanaan program pendidikan, pembangunan irigasi, dan perpindahan penduduk membutuhkan pembiayaan, sementara pemerintah Hindia Belanda juga menghadapi kebutuhan anggaran untuk menjalankan pemerintahan dan mempertahankan kekuasaannya. Sehingga, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk menopang keuangan kolonial (DDTCNews, 2019).

Perlawanan terhadap kebijakan *belasting* awalnya meletus di Kamang pada 15 Juni 1908, dipimpin oleh H. Abdul Manan. Kemudian, perlawanan meluas ke sejumlah wilayah Sumatera Barat, termasuk Nagari Manggopoh. Siti Manggopoh bersama suaminya, Rasyid Bagindo Magek, memimpin perlawanan setelah mendapat dukungan tokoh adat dan ulama, lalu menghimpun 17 pejuang berbekal ilmu silat dan pendidikan surau (Harlina, 2020). Siti menyusup ke markas Belanda untuk mengumpulkan informasi, sementara Rasyid mengatur pembagian pasukan. Pada malam 16 Juni 1908, sehari setelah perlawanan di Kamang, para pejuang menyerang markas Belanda dan dilaporkan menewaskan 53 tentara. Belanda kemudian mengerahkan pasukan marsose untuk menumpas perlawanan (Suryo, 2022).

Peran Siti Manggopoh penting untuk memahami perempuan sebagai pelaku sejarah, karena narasi perjuangan sering menempatkan laki-laki sebagai tokoh utama. Keterlibatannya dalam membangun dukungan, mengumpulkan informasi, menyusun

strategi, hingga bertempur langsung menunjukkan peran yang lebih luas, sehingga kajiannya perlu menelaah bagaimana ia direpresentasikan dalam sumber sejarah dan narasi Perang Belasting. Berdasarkan uraian tersebut, artikel berjudul "*Kiprah Perempuan dalam Perang Belasting: Historiografi Perlawanan Siti Manggopoh di Nagari Manggopoh 1908*" bertujuan mengkaji keterlibatan Siti Manggopoh dalam perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menempatkan perempuan sebagai perspektif utama. Kajian ini berfokus pada bentuk keterlibatan Siti dalam perjuangan, hubungannya dengan jaringan sosial, adat, dan keagamaan masyarakat Manggopoh, serta representasi kiprahnya dalam sumber-sumber sejarah.

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-historis dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, serta menganalisis historiografi perlawanan Siti Manggopoh di Nagari Manggopoh 1908. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah studi pustaka (*library research*) yang merupakan suatu cara untuk memanfaatkan berbagai sumber literatur yang tersedia secara luas. Sumber-sumber tersebut dapat ditemui melalui buku, artikel-artikel, maupun jurnal-jurnal lainnya. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif-historis, suatu peristiwa ataupun fenomena dapat dipahami dengan menelusuri konteks waktu maupun latar belakangnya. Dalam studi kepustakaan, metode ini melalui beberapa tahapan, di antaranya mencakup pada proses heuristik, verifikasi, interpretasi, serta historiografi (Sugiyono, 2016)**.**

Adapun teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan dan dominan milik Max Weber. Kekuasaan menurut Max Weber dapat dipahami sebagai kemampuan baik dari individu maupun kelompok untuk memengaruhi, membimbing, dan mengatur perilaku orang lain, bahkan ketika di antara mereka tidak menyetujuinya. Kekuasaan tidak dapat lepas dari realita sosial, karena selalu berada di pihak yang memiliki dorongan untuk berkuasa (*will to power*) dan pihak yang cenderung menerima pengaruh atau patuh (*will to submission*).

Adapun kemampuan untuk mengontrol dalam proses pengambilan keputusan dan memperoleh pengakuan yang sah melalui mandat ataupun wewenang formal menunjukkan kekuasaan dalam konteks politik dan pemerintahan. Kekuasaan memiliki sifat relasional, yaitu berasal dari interaksi sosial yang terdiri dari aturan, struktur, dan hubungan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dipengaruhi (Qoirunnisa & Wahyuni, 2025). Max Weber mendefinisikan dominasi sebagai ketaatan seseorang ataupun kelompok terhadap perintah yang diberikan oleh pihak yang berwenang

(*authority*). Ketaatan terhadap tindakan tertentu menunjukkan bahwa orang yang memiliki otoritas mengontrolnya.

Sumber primer dalam penelitian ini berupa arsip surat kabar sezaman dalam berbahasa Belanda yang merekam dinamika kebijakan pajak (*belasting*) pada tahun 1908. Arsip tersebut ditelusuri dan diakses melalui Delpher (*delpher.nl*), repositori digital koleksi Koninklijke Bibliotheek, Belanda. Sumber pertama berupa surat kabar yang berjudul "*Sumatra-Bode*" edisi 04 September 1908, terbitan Padang oleh *Sumatra Bode* & *Tjaja Sumatra* (Redactie, 1908). Sumber kedua berupa surat kabar yang berjudul "*Het Volk*" edisi 08 April 1908, terbitan Amsterdam oleh *Sociaal-Democratische Arbeiderspartij* (SDAP) (Redactie, 1908). Adapun sumber sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, maupun artikel lainnya yang relevan dan mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Kajian tentang Perang Belasting 1908 umumnya menempatkan peristiwa ini sebagai perlawanan rakyat Minangkabau terhadap kebijakan pajak kolonial yang dianggap mengingkari Plakat Panjang 1833 dan mengganggu tatanan adat, terutama kepemilikan tanah ulayat. Dalam kajian pendidikan sejarah, (Budiman & Kumalasari, 2026) mengkaji H. Abdul Manan dan Siti Manggopoh sebagai tokoh perlawanan, dan menemukan nilai karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas yang berpotensi menjadi sumber belajar sejarah. Dari sisi gender, (Fatimah, 2022) juga membandingkan perempuan Minangkabau dengan perempuan Jawa pada masa kolonial. Kajian-kajian tersebut cenderung menitikberatkan pada rekonstruksi peristiwa, nilai karakter, memori, atau simbol, sehingga analisis tentang bagaimana peran Siti Manggopoh direpresentasikan dalam sumber sejarah dan bagaimana kedudukan perempuan dibentuk dalam narasi Perang Belasting masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Perang Belasting dan Perlawanan Masyarakat Nagari Manggopoh

Nagari Manggopoh adalah salah satu nagari yang letaknya di kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Adapun luas wilayah nagari Manggopoh saat ini mencapai 116,85 km² dan menjadi satu-satunya wilayah terluas dan memiliki peran yang sangat penting mendukung aktivitas masyarakat di tingkat kecamatan maupun

kabupaten (Noer, 2025). Lokasi nagari Manggopoh sekitar 11 km dari Tiku dan 9 km di sebelah barat Lubuk Basung, atau kurang lebih 60 km di utara Bukittinggi.

Berdasarkan catatan sejarah, penamaan "Manggopoh: dikaitkan dengan mata air bersih yang disebut sebagai "air simaruwok" di wilayah Lubuk Lansek. Istilah mangkapopoh berasal dari sifat mata airnya yang mana mata air itu kini berada di sekitar Simpang Gudang, Jorong Balai. Adapun nagari Manggopoh merupakan salah satu nagari tertua di bagian barat kabupaten Agam yang mana sudah ada sejak abad ke-19.

Nagari Manggopoh merupakan salah satu kenagarian yang berasal dari tanah Minangkabau, yang mana kehidupan sosialnya terbentuk dari tiga unsur kepemimpinan yang saling menopang, yaitu adat, agama, dan kaum cerdik pandai. Susunan ini terlihat dalam pertemuan sosialisasi pajak yang dipimpin oleh Kontrolir L.C. Westenek di Bukittinggi, ketika pemerintah kolonial memanggil *laras* (kepala wilayah), *penghulu* (pemimpin adat), *kepala nagari* (lurah), para cerdik pandai (*manti*), dan *dulubalang* (petugas keamanan) pada tanggal 16 Maret 1908.

Selain itu, tatanan sosial di Minangkabau memiliki dua ciri khas penting. Pertama, sistem kekerabatan matrilineal, yang mana perempuan dipandang sebagai pewaris garis keturunan dan harta pusaka, serta pemegang otoritas kaumnya, sedangkan tanah ulayat dikaitkan dengan adanya figur *Bundo Kanduang*. Kedua, kepemilikan tanah yang bersifatkan secara terbuka. Mengutip dari Rusli Amran, ia menekankan bahwasanya kepemilikan tanah berbeda dengan kebijakan di Jawa. Tanah di Sumatera Barat tidak dianggap sebagai milik perseorangan, raja, ataupun negara (DDTCNews, 2019).

Selain itu, masyarakat nagari Manggopoh memiliki agama yang kuat. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pertemuan rahasia untuk mempersiapkan yang diadakan di sebuah surau di Kampung Parit, yang mana jaraknya beberapa ratus perlawanan meter dari benteng Belanda. Di sana terdapat tokoh adat, agama, cendekiawan, dan pemuda yang hadir saat itu. Saat itu mereka berdoa serta mengucapkan sumpah setia, dengan Pacik Tuanku Padang yang berperan sebagai penasihat (Afrima et al., 2019).

Kebijakan pajak (*belasting*) diumumkan secara langsung oleh Gubernur Jenderal pada 21 Februari 1908 dan berlaku di seluruh Hindia Belanda pada tanggal 01 Maret 1908 dengan tarif pajaknya rata-rata sebanyak 2%. Kebijakan ini diharapkan dapat mengisi kembali kas pemerintahan, mengingat bahwasanya pemasukan dari komoditas ekspor sedang lesu seiring turunnya harga di pasar Eropa. Pemerintah sendiri juga melakukan sosialisasi terhadap kebijakan penerapan pajak tersebut kepada beberapa kepala nagari,

seperti Air Bangis, Painan, Padang Panjang, serta Manggopoh yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Jenis-jenis pungutan dari kebijakan pajak (*belasting*) ini beragam yang baru diperkenalkan, di antaranya pajak kepala (*hoofd*), pemasukan barang (*inkomsten*), rodi (*hedendisten*), tanah (*landrente*), keuntungan (*wins*), rumah tangga (*meubels*), penyembelihan (*slach*), tembakau (*tabak*), serta pajak rumah adat (*huizen*). Akan tetapi, sosialisasi tersebut tidak berjalan lancar. Hal ini disebabkan karena laras dan kepala nagari memprotes keras pada kebijakan tersebut. Mereka juga bersikeras bahwasanya pajak tersebut tidaklah efektif, apalagi terdapat pajak penyembelihan hewan qurban, serta tanah dan tanaman kopi yang menjadi tanaman utama di kawasan Agam sejak *Cultuurstelsel*. Selain itu, mereka juga mengingatkan peristiwa 75 tahun yang lalu pada saat Perang Padri, melalui Plakat Panjang (1833) pemerintah Hindia Belanda telah menyatakan untuk tidak akan ada lagi pemungutan pajak, dan meminta masyarakat untuk memperluas penanaman kopi. Akan tetapi, tanaman kopi pun akan dikenai pajak dari pemerintah.

Tidak hanya protes, beberapa nagari mulai mengeluarkan resolusi penentangan. Sebagian ada yang menolak datang untuk memenuhi undangan sosialisasi dari pemerintah dan sebagian lainnya juga ada yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Asisten Residen di Bukittinggi. Mereka juga melakukan aksi perobekan blanko pembayaran pajak pemerintah kolonial (DDTCNews, 2019).

Akibat kebijakan pajak (*belasting*) yang diterapkan oleh pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda, perang pun tak terhindarkan yang meletus pada tahun 1908 di Manggopoh yang kemudian dinamai dengan Perang Belasting. Adapun beberapa faktor utama dinamai Perang Belasting adalah sebagai berikut ini; faktor pertama, terjadinya pelanggaran atas Plakat Panjang (1833) setelah Perang Padri, yang mana pemerintah Hindia Belanda memberikan janji, yang salah satunya adalah menghentikan pungutan pajak kepada masyarakat Minangkabau. Dalam Plakat Panjang, pemerintah kolonial juga turut meminta kepada masyarakat Minangkabau untuk memperluas penanaman kopi. Akan tetapi, setelah perkebunan kopi meluas, komoditas tersebut justru dimasukkan sebagai objek pajak.

Faktor kedua, penerapan peraturan pajak oleh pemerintah Hindia Belanda juga bertentangan dengan adat masyarakat Minangkabau. Berbeda dengan Jawa yang menganggap tanah atau lahan merupakan kepemilikan perseorangan, raja, ataupun

negara, di Sumatera Barat kepemilikan tanah bersifatkan komunal atau terbuka. Dan pungutan pajak dari hasil tanah ulayat sangat bertentangan dengan nilai masyarakat Minangkabau. Selain itu, terdapat faktor ketidakpemahaman pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Minangkabau dan masih menerapkan cara pandang patriakal kepada masyarakat Minangkabau yang matrilineal (DDTCNews, 2019) .

Adapun faktor yang ketiga adalah ambisi dari pemerintah kolonial dalam merealisasikan berbagai program dan kebijakan yang mana terlalu mengandalkan pajak. Hal ini disebabkan setelah dihapuskannya kebijakan *Cultuurstelsel* pada tahun 1870, Kerajaan Belanda membutuhkan dana yang besar untuk membayar utang dan membangun negaranya. Selain itu, belum lagi untuk membiayai salah satu perang terbesar yang mereka hadapi, yaitu Perang Aceh (1873-1904), sekaligus menjalankan Politik Etis demi memajukan kesejahteraan pribumi yang dimulai pada tahun 1901 (Noer, 2025).

Selain dari kebijakan pajak yang diterapkan dari pemerintahan Hindia Belanda yang membuat rakyat menderita, terdapat faktor lainnya seperti banyaknya korban pelecehan perempuan di Manggopo yang dilakukan oleh serdadu tentara Belanda untuk memuaskan permainan nafsu rendah mereka, sehingga meletuslah Perang Belasting pada tahun 1908.

Selain nagari Manggopoh, terdapat beberapa wilayah yang melakukan gerakan penolakan terhadap kebijakan pajak (*belasting*) yang di antaranya seperti daerah Sawahlunto, Bonjol, Matur, Lubuk Sikaping, Palembayan, Alahan Panjang, Muaro Labuh, Tiku, dan Lubuk Basung. Peristiwa ini berpuncak pada Perang Maggopoh. Ketika rakyat menerima blanko pajak tersebut, masyarakat tersebut langsung merobek-robekan blanko tersebut. Pemerintah akhirnya mengetahui tindakan penghinaan terhadap kebijakan tersebut yang kemudian semakin lama memicu semangat perlawanan.

Bulan Maret 1908, sebuah pasukan kavaleri Belanda memasuki nagari Manggopoh. Sejak didirikannya benteng Belanda dengan 55 orang tentara Belanda, mereka melakukan patroli harian di sekitar kampung-kampung dan mulai menangkap orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin gerakan rakyat yang menentang atas kebijakan Belanda. Sehari setelah terjadinya Perang Kamang, pada tanggal 16 Juni 1908 di Manggopoh, terjadilah perlawanan rakyat terhadap Pemerintah Belanda, yang mana pasukan tersebut di pimpin oleh seorang perempuan pemberani yang menentang kekejaman Belanda.

Di sebuah surau di Kampung Parit, yang letaknya beberapa ratus meter dari benteng Belanda, dilakukanlah rapat secara tertutup antara pemimpin rakyat dari kalangan adat, agama, cendekiawan, dan pemuda. Gerakan ini dipimpin oleh Pacik Tuanku Padang, yang merupakan seorang penasihat utama di Manggopoh. Dalam pertemuan tersebut, para peserta yang hadir itu memanjatkan doa kepada Allah dan mengucapkan sumpah kesetiaan; tidak akan ada yang mundur selangkah pun, tidak akan ada yang kembali. Dari pertemuan rahasia tersebut, lahirlah sebuah pasukan yang terdiri atas 17 orang di bawah kepemimpinan Siti, dengan dukungan dari suaminya, Hasyik atau Rasyid Bagindo Magek, beserta 15 anggota lainnya.

Sesampainya di wilayah yang ditargetkan, mereka segera mengepung benteng dengan ketat pada pukul 22.00 malam. Mereka telah menyiapkan strategi dengan matang. Rudus yang mereka genggam terasa tidak sabar untuk bertemu musuh dan seluruh pasukan menunggu perintah dari komando yang diberikan kepada Rasyid. Selama satu setengah jam, mereka mengepung dengan sabar, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Pengepungan tersebut tidaklah terdeteksi oleh Belanda. Menjelang tengah malam, Rasyid Bagindo Magek memberikan komando untuk bergerak lebih dekat ke benteng. Sementara itu, Siti dan Majo Ali mulai menyusup ke dalam benteng. Suasana yang menegangkan kemudian diikuti oleh Dullah dan Rasyid yang juga meyusup masuk. Sementara, sepuluh orang lainnya, yaitu Rahman Sidi Rajo, Tabuh Mangkuto Sutan, Dukap, Muhammad, Tabad Sutan Saidi, Kalik Bagindo Marah, Unik, Sain Sidi Malin, Kana, dan Dullah Pakih tetap berada di luar untuk mengawasi benteng, Pertempuran pun dimulai dan terjadi perang sabil di dalam benteng. Strategi pasukan Siti adalah membedakan musuh dari kawan berdasarkan reaksi mereka terhadap rudus, yang terkena rudus adalah musuh dan yang tidak terkena adalah kawan.

Tiba-tiba semuanya menjadi sunyi dan menandakan bahwa sudah tidak ada lagi serdadu Belanda yang hidup. Pertempuran berhenti dan mereka yakin semua serdadu Belanda telah tewas. Mereka tidak ingin terburu-buru dan memastikan tidak ada yang tersisa dari 55 serdadu Belanda yang harus mereka habisi di benteng tersebut. Setelah diyakini semua serdadu Belanda telah gugur, mereka mulai bergerak menuju utara untuk kembali. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara tembakan beruntun. Mendengar suara tembakan, mereka segera melompat dan melarikan diri. Namun, nasib buruk menimpa Siti dan Rasyid karena tembakan membabi buta yang mengenai tubuh mereka. Siti

terkena pada bagian punggung kanan atas, sementara Rasyid terkena bagian bawah tubuhnya.

Ternyata serangan pasukan rakyat tersebut melesat dari dua target utama, hanya tersisa dua dari 55 serdadu Belanda yang berhasil selamat dari pertempuran ini. Keesokan harinya, di pagi buta, kedua serdadu yang selamat melaporkan kejadian tersebut ke Lubuk Basung dan menyampaikan kabar duka tentang 53 rekan mereka yang tewas dengan mengenaskan. Segera setelah itu, pasukan diperkuat dan dikirimkan ke nagari Manggopoh, dengan bantuan tentara tambahan dari Pariaman dan Bukittinggi. Adapun jenazah-jenazah dari serdadu Belanda diangkut ke Lubuk Basung menggunakan pedati.

Serdadu-serdadu Belanda yang dikirimkan dari Pariaman dan Bukittinggi melakukan tindakan operasi pembersihan dan penangkapan. Sebagian besar tokoh masyarakat Manggopoh ditahan di Lubuk Basung, dan di Kesalarasan serta Tiku diumumkan dilarang keluar masuk bagi penduduk. Tuanku Padang bersama Nak Abas dan Samun merasa tiba pada saat yang tepat untuk bertindak. Terutama setelah melihat Belanda menggunakan kekerasan saat pelarian Siti, Tuanku Padang bersama orang-orang kepercayaannya berniat membuktikan kesetiaan terhadap perjuangan sahabat-sahabatnya. Dengan semangat yang membara, pada malam itu sekitar pukul 20.00 setelah melaksanakan salat isya serta berdoa dan berzikir, mereka bertiga berangkat menuju benteng Belanda.

Kedatangan mereka disambut dengan tembakan dari serdadu Belanda, namun tembakan-tembakan awal tersebut tidak mampu melukainya. Karena keyakinan dan semangat jihad yang kuat, ketiga prajurit ini seolah kebal terhadap peluru, sehingga serdadu Belanda terus menembaki mereka hingga Tuanku Padang, Nak Abas, dan Samun akhirnya menghembuskan napas terakhir mereka dan gugur sebagai pahlawan syahid (Afrima et al., 2019).

Biografi Siti Manggopoh dan Peran dalam Perang Belasting 1908

Siti Manggopoh atau yang akrab dipanggil *Mandeh* atau Mande Siti lahir pada 1 Mei 1880 di Nagari Manggopoh, Lubuk Basung, Agam, dan wafat pada 22 Agustus 1965. Ia merupakan anak bungsu dari enam bersaudara dan satu-satunya anak perempuan. Orang tuanya, Sutan Tariak dan Mak Kipap, hidup sederhana sebagai petani. Tumbuh bersama lima kakak laki-laki membuat Siti akrab dengan lingkungan surau, pasar, sawah, dan gelanggang silat. Sejak kecil, ia mempelajari Al-Qur'an, *bapasambahan,* dan *silek*

(Afdhal, 2021). Meskipun tidak menempuh pendidikan formal, pendidikan di surau dan latihan bela diri membentuk kepribadiannya menjadi jujur, disiplin, dan percaya diri (Budiman & Kumalasari, 2026).

Kepribadian Siti juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat pesisir yang terbuka dan tidak membeda-bedakan kedudukan seseorang. Dalam lingkungan tersebut, ia memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Siti kemudian memilih Rasyid Bagindo Magek, teman bermainnya sejak kecil, yang kelak memiliki tujuan yang sama dengannya dalam melawan penjajahan. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak, yaitu Dalima dan Yaman. Keberaniannya dalam menghadapi penjajah membuat Siti Manggopoh dikenal dengan julukan "Singa Betina dari Manggopoh" (Fatimah, 2022).

Keterlibatan Siti Manggopoh dalam perlawanan terhadap kebijakan belasting di Manggopoh pada 1908 melalui sejumlah tahapan. Perlawanan tersebut bermula ketika pemerintah kolonial Belanda menempatkan pasukannya di Ketinggian untuk memastikan penerapan kebijakan pajak. Keberadaan pasukan Belanda tidak hanya bertujuan memaksakan pembayaran pajak, tetapi juga diwarnai tindakan sewenang-wenang, termasuk pelecehan terhadap perempuan. Situasi ini mendorong Siti bersama suaminya untuk berkonsultasi dengan Mak Luma sebagai ninik mamak, Haji Abdul Gafar, dan Haji Abdul Manan. Setelah mendapatkan persetujuan dari para tokoh tersebut, keduanya mulai menyusun rencana perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Pada tahap persiapan, Siti membentuk kelompok perlawanan yang beranggotakan 17 orang dengan kemampuan bela diri silek. Kelompok tersebut mengadakan pertemuan secara tertutup di Surau Kampung Parit serta berlatih di Padang Mardani menggunakan senjata tradisional, seperti keris, *ruduih*, dan *ladiang*. Untuk menjaga kerahasiaan aktivitas mereka, para anggota menyamarkan latihan tersebut dengan berpura-pura pergi mengaji sehingga tidak menarik perhatian masyarakat maupun pihak Belanda. Di samping mengoordinasikan persiapan kelompok, Siti turut berperan dalam mengumpulkan informasi mengenai kekuatan militer lawan. Ia bahkan menyusup ke markas Belanda untuk mengamati sekaligus memperkirakan jumlah dan kekuatan pasukan yang akan dihadapi dalam perlawanan.

Puncak perlawanan terjadi pada 16 Juni 1908. Dalam penyerangan tersebut, Rasyid membagi pasukan menjadi kelompok yang bertugas menyerang dan kelompok yang mengepung pasukan Belanda. Siti turut terlibat secara langsung dalam pertempuran

dengan membantu Majo Ali menghadapi seorang perwira Belanda hingga perwira tersebut tewas akibat serangan menggunakan ruduih. Serangan ini menimbulkan korban besar di pihak Belanda. (Fatimah, 2022) menyebutkan bahwa sebanyak 53 tentara Belanda tewas, sedangkan (Sari, 2022) mencatat jumlah 55 orang. Perbedaan angka tersebut menunjukkan perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap sumber-sumber sejarah yang digunakan untuk memastikan jumlah korban secara lebih akurat.

Setelah penyerangan, Siti menjadi buronan dan dikejar selama 17 hari sebelum akhirnya menyerahkan diri kepada pemerintah kolonial Belanda. Ia kemudian menjalani hukuman penjara selama 14 bulan di Lubuk Basung, 16 bulan di Pariaman, dan 12 bulan di Padang. Hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepadanya pada akhirnya dibatalkan. Sementara itu, Rasyid Bagindo Magek diasingkan ke Manado dan kemudian wafat di Tondano. Menurut (Afdhal, 2021), keputusan Siti untuk menyerahkan diri didorong oleh keinginannya agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban kekejaman Belanda.

Hubungan Siti Manggopoh dengan masyarakat dan para pejuang dalam Perang Belasting menunjukkan bahwa perlawanan tersebut dibangun melalui kerja sama antara berbagai pihak. Suaminya, Rasyid Bagindo Magek, tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga berperan dalam merancang strategi pertempuran. Sementara itu, dukungan tokoh adat dan ulama, seperti Mak Luma, Haji Abdul Gafar, dan Haji Abdul Manan, memberikan penguatan adat dan agama terhadap perjuangan mereka.

(Budiman & Kumalasari, 2026) memaknai keterlibatan berbagai pihak tersebut sebagai bentuk gotong royong. Di kalangan pejuang, Siti menjalin hubungan erat dengan anggota kelompok yang sebagian besar merupakan teman masa kecilnya, termasuk Dullah dan Ali. Ia juga menunjukkan kepemimpinan dengan mendorong para pejuang yang sempat ragu untuk melanjutkan perjuangan hingga mereka bersama-sama mengucapkan sumpah di atas Al-Qur’an.

Representasi Siti Manggopoh dan Rekonstruksi Historiografi Perang Belasting

Representasi Siti Manggopoh tentu memiliki cara pandang yang berbeda-beda, baik dari sumber kolonial, sumber lokal, dan historiografi modern. Berdasarkan sumber kolonial, peneliti mengambil dua arsip kolonial melalui delpher.nl yang sebagaimana dijadikan sumber pirmer dalam mendukung penelitian ini. Arsip tersebut berjudulkan *Het Volk* dan *Sumatra-Bode* yang mana kedua majalah ini memuatkan artikel yang sama,

yaitu *De opstand op Sumatra's Westkust*, yang dikutip dari tulisannya Mr. P. Brooshooft di majalah *de Beweging*.

Artikel Brooshooft membuka dengan pertanyaan yang menurutnya diajukan kepada orang Belanda dengan pertanyaannya, mengapa orang "Melayu" di Pantai Barat Sumatra bangkit dalam perlawanan berdarah hanya karena beberapa pajak, dan apakah pajak itu memang berat atau tidak adil. Ia kemudian menyajikan pembelaan para pejabat pemerintah kolonial saat itu, misalnya seperti pajak penghasilan sebanyak 2% dengan pembebasan penghasilan hingga dan pajak penyembelihan per kerbau, sapi, atau kuda yang disebut setara dengan daerah lain. Setelah itu ia membantahnya. Menurut penulisnya, sebab utamanya bukanlah besaran tarif, melainkan pelanggaran Plakat Panjang, yaitu perjanjian pasca-1833 yang mana dalam perjanjian tersebut menjamin kebebasan menjual kopi, akan tetapi justru diikuti kerja paksa (*heerendiensten*), penyerahan kopi dengan harga yang rendah, dan hukuman bagi yang menolak.

Teks tersebut juga menghitung nilai kerja paksa dan menyebutkan keuntungan pemerintah dari kopi sebagai laba bertahun-tahun. Pajak 1908 dipandang bukan ide yang dibuat secara mendadak. Rencananya disebut berakarkan pada usulan komisi negara 1888 dan keputusan prinsip 1894, sementara peraturannya baru sampai di Padang pada 21 Februari dan harus berlaku 1 Maret 1908.

Berdasarkan teori kekuasaan dan dominasi milik Max Weber, representasi Siti Manggopoh dalam ketiga kelompok sumber dapat dibaca sebagai cerminan relasi antara pihak yang mengklaim otoritas dan pihak yang menarik ketaatannya. Pemerintah Hindia Belanda menjalankan kekuasaan melalui regulasi belasting yang diberlakukan secara formal pada 1 Maret 1908, tetapi dominasi tersebut kehilangan basis legitimasinya karena kebijakan itu dianggap melanggar Plakat Panjang dan adat Minangkabau. Ketaatan masyarakat, yang menurut Weber menjadi inti dominasi, akhirnya runtuh dan berubah menjadi perlawanan.

Dalam arsip kolonial, runtuhnya ketaatan ini dibingkai melalui label opstand dan oproerlingen serta penyebutan massa anonim seperti "de Meleier", sehingga perlawanan tampil sebagai gangguan terhadap otoritas yang sah, dan tidak ada ruang bagi representasi Siti sebagai individu. Sebaliknya, sumber lokal dan historiografi modern menempatkan Siti sebagai pusat otoritas tandingan. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, kekuasaan praktis berada di tangan laki-laki seperti niniak mamak dan penghulu, sedangkan

perempuan tidak dapat diangkat menjadi penghulu, sehingga kepemimpinan Siti tidak bersumber dari kedudukan struktural.

Otoritasnya lahir dari pengakuan moral komunitas atas keberanian dan keteguhannya, yang diperkuat oleh konsultasinya dengan niniak mamak dan ulama serta sumpah di atas Al-Qur'an. Pola ini mendekati otoritas karismatik dalam tipologi Weber, yaitu ketaatan yang tumbuh dari kepercayaan terhadap kualitas luar biasa seorang tokoh, dan julukan "Singa Betina" serta sapaan "Mandeh" menjadi bentuk pengakuan simbolik atas otoritas itu. Di sisi lain, pelecehan terhadap perempuan oleh serdadu Belanda dan penyanderaan istri Dullah dan Majo Ali menunjukkan bahwa tubuh perempuan menjadi arena kekuasaan kolonial.

Dalam redaksi *Sumatra-Bode* menambahkan catatan yang menolak penyamarataan bahwa koran-koran lokal hanya mengulang pembelaan pemerintah, dan menutup kutipan dengan kalimat tajam bahwasanya pemerintah tidak melihat atau tidak mau melihat. *Het Volk* memuat tulisan yang sama dalam bingkai kritik terhadap eksploitasi kolonial.

Dari sisi bahasa dan pelabelan, peristiwa dilabeli dengan *opstand* (pemberontakan), pelakunya disebut *oproerlingen*, dan perlawannnya disebut sebagai *bloedig verzet*. Kata "perang" tidaklah digunakan, berbeda dengan penyebutan Perang Belasting dalam historiografi Indonesia. Pelaku juga menyamakan dengan "*de Meleier*" dan "*het Maleischa volkje*".

Namun, di dalam sumber kolonial yang digunakan dalam penelitian ini tidak ditemukannya ataupun diksi terkait representasi dari Siti Manggopoh dalam pandangan sumber kolonial. Hal tersebut di sebabkan karena fokus dari kedua sumber kolonial tersebut lebih mengarah pada ketidaksetujuan masyarakat Minangkabau terhadap kebijakan pajak (*belasting*) dari pemerintah Hindia Belanda.

Berdasarkan sumber lokal, representasi Siti Manggopoh bekerja melalui tuturan keluarga, upacar, penamaan, dan monumen. Generasi tua (berkisar umur 55-89 tahun) memiliki ingatan yang kuat dan emosional yang diwariskan secara lisan, sedangkan generasi muda mengenal Siti melalui sekolah terutama, media sosial, dan peringatan seremonial. Lalu ada pula dari keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pelaku, misalnya seperti keturunan Mangkuto Tabuah, serta posisi sosial masyarakat nagari Manggopoh, yaitu dari tokoh adat yang tentunya juga memengaruhi kedalaman ingatannya.

Berdasarkan ingatan yang diwawancarai sebanyak 73 orang, Siti digambarkan sebagai perempuan yang berani mengangkat senjata, memimpin, dan tidak gentar, serta menjadi simbol kehormatan perempuan Minangkabau. Julukan "Singa Betina" dan sapaan Mandeh Siti lahir dari tradisi ini. (Fatimah, 2022) juga menulis bahwa masyarakat Manggopoh tidak mengetahui nama asli Siti, sehingga namanya sendiri merupakan hasil konstruksi, honorifik "mandeh" ditambah dengan nama tempat. Adapun monumen yang ada di Lubuk Basung menjadi wahana representasi lainnya terkait Siti Manggopoh.

Berdasarkan historiografi modern, yaitu dari karya akademik yang relevan memiliki kerangka yang berbeda. Dari (Afrima et al., 2019) yang menyusun sebab, kronlogi, dan akibat berbasiskan literatur. (Fatimah, 2022) menggunakan sejarah lisan dan tipologi budaya pesisir.

Persamaan dari sumber lokal dan akademik dapat disepakati pada kebijakan *belasting* (pajak) merupakan pelanggaran dari Plakat Panjang dan adat yang merupakan perjanjian dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1833. Adapun Manggopoh meletus setelah Perang Kamang, Siti memimpin pasukan sebanyak 17 orang bersama Rasyid, 53 dari 55 serdadu Belanda tewas, dan Siti berakhir menyerahkan dirinya setelah 17 hari. Adapun dalam arsip kolonial sejalan dengan pembahasan Plakat Panjang dan pelanggaran dari pemerintah Hindia Belanda yang muncul sebagai penjelasan utama, bukan sekadar dari tarif pajak yang diambil.

Adapun perbedaan dalam representasi Siti Manggopoh berdasarkan ketiga sumber tersebut, yaitu sumber kolonial, sumber lokal, dan historiografi modern dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Aspek	**Sumber/ Arsip Kolonial**	**Sumber Lokal dan Historiografi Modern**
Label peristiwa	*Opstand, oproer, bloeding verzet*	Perang Belasting, Perang Manggopoh, Perang Sabil
Fakus	Kebijakan pajak dan kegagalan pemerintah Hindia Belanda	Adat, agama, kehormatan nagari, dan tokoh
Aktor	"de Meleier" sebagai massa; pejabat Belanda	Individu bernama Siti, Rasyid, Majo, dan pasukan lainnya.
Perempuan	Hanya perempuan Eropa yang dievakuasi	Siti sebagai pemimpin, perempuan sebagai korban dan sandera

Korban	Menyebutkan ratusan *oproelingen*, pejabat yang terbunuh	53 serdadu Belanda yang tewas, korban masyarakat Manggopoh yang 7 tewas dan 7 lainnya ditangkap
Gaya	Argumen politik-ekonomi dengan angka	Narasi yang bersifatkan heroik, dialog, dan ritual

Selain itu, terdapat pula perbedaan antara sumber lokal dengan historiografi modern, seperti usia dan tahun hidupnya Siti yang disebutkan dalam beberapa variasi, di antaranya ada yang menyebutkan berusia 28 tahun, ada yang menyebutkan berusia 26 tahun, 80, dan 84 tahun. Adapun contoh lainnya, seperti pemvonisan Siti yang mengatakan divonis selama 14, 16, dan 12 bulan, adapula yang menyebutkan divonis seumur hidup.

Adapun perbedaan lainnya seperti perbedaan genre dan kepentingan. Yang mana di dalam sumber kolonial, di dalam arsip 1908 menjawab pertanyaan "mengapa pajak memicu kekerasan", sedangkan dalam tradisi lokal menjawab "siapa yang melawan dan bagaimana ia diingat".

Dalam sistem matrilineal Minangkabau, perempuan mewarisi harta pusaka dan menjadi penentu garis keturunan, akan tetapi pada kekuasaan praktisnya dijalankan oleh saudara laki-lakinya, seperti niniak mamak dan penghulu. Perempuan tidaklah dapat diangkat menjadi penghulu, meskipun memiliki hak dalam mengawasi dan memberikan pendapat. (Fatimah, 2022) merangkum delapan ciri dari matrilineal, termasuk bahwa kekuasaan secara teoretis berada di tangan ibu, akan tetapi menjalankannya adalah laki-laki. Kepemimpinan Siti bukanlah terlahir dari hak struktural, akan tetapi ia lahir dari pengakuan moral komunitas atas keberaniannya dan keteguhannya.

Pajak atas tanah mengenai basis ekonomi dan simbolik perempuan, disebabkan karena tanah ulayat diwariskan lewat garis perempuan. Selain kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah, terjadinya pelecehan terhadap perempuan oleh serdadu Belanda di benteng yang menjadi salah satu pemicu terjadinya Perang Manggopoh 1908. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan menjadi arena kekuasaan kolonial. Bahkan, pada hari penyerbuan, Belanda juga menahan perempuan sebagai sandera pengganti ketika pelaku laki-laki tidak ditemukan, yaitu istrinya Dullah dan Majo Ali.

(Fatimah, 2022) juga mencatat saat Siti ditahan di Lubuk Basung, Pariaman, dan Padang, lalu kemudian dipulangkan ketika suaminya dibuang ke Manado. Orang tuanya wafat tak lama kemudian, dan ia akhirnya membesarkan kedua anaknya seorang diri.

Sumber-sumber menggambarkan Siti bukan hanya sekedar sebagai petarung, akan tetapi sebagai pelaku dengan beberapa peran, di antaranya seperti sebagai organisator, yang mana ia membentuk pasukan sebanyak 17 orang dan berkonsultasi dengan niniak mamak serta ulama. Di antaranya tokoh-tokoh tersebut adalah Mak Luma, H. Abdul Gafar, dan Haji Abdul Manan. Hal ini menunjukkan perlawanan yang dilegitimasi adat dan agama, bukan amukan yang dilakukan spontan.

Siti bukanlah satu-satunya perempuan Minangkabau yang melakukan pemimpin terhadap perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kontribusi perempuan bukanlah sekadar pelengkap, akan tetapi bagian integral dari gerakan perlawanan yang lebih luas. Dalam periode yang sama, Rasiman Ismail juga mengorganisasi perempuan melalui kegiatan sosial politik. Sementara itu, Rohana Kudus bergerak di pers dan pendidikan, dan *Soenting Melajoe* menjadi media tulis perempuan. Maka Siti dapat ditempatkan pada kutub perlawanan bersenjata dan publik, berdampingan dengan kutub pendidikan dan pers.

Siti dapat direpresentasikan dari heroisasinya yang mana ia mendapatkan julukan "Singa Betina" yang mana bentuk kodean bahwa Siti merupakan sosok yang pemberani dan "Mandeh" sebagai citranya seorang ibu. Hal ini menempatkan Siti pada dua citra yang lazim bagi perempuan pejuang, perkasa, dan keibuan.

KESIMPULAN

Perang Belasting di Nagari Manggopoh pada tahun 1908 meletus akibat kemarahan masyarakat Minangkabau yang memuncak terhadap kebijakan pajak kolonial Belanda. Kebijakan tersebut dinilai mencederai janji Plakat Panjang tahun 1833 setelah Perang Padri dan bertentangan langsung dengan hukum adat tanah ulayat, yang kemudian semakin diperparah oleh aksi kesewenang-wenangan serta pelecehan moral oleh kaum kolonial. Berakar kuat pada sinergi kepemimpinan adat, agama, dan kaum muda di surau, perlawanan ini memuncak pada penyerangan taktis ke benteng Belanda oleh 17 pejuang di bawah komando Siti Manggopoh bersama suaminya, Rasyid Bagindo Magek, yang berhasil menewaskan sebagian besar serdadu musuh sebelum memicu operasi pembersihan serta pengorbanan para tokoh pejuang lainnya.

Dalam narasi sejarah tersebut, Siti Manggopoh tampil sebagai sosok perempuan inspiratif yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi dalam menentang penindasan kolonial. Berbekal nilai-nilai pendidikan agama dan kebudayaan Minangkabau, ia tidak hanya mengambil peran sebagai penggerak taktis, tetapi juga terlibat langsung dalam menyusun strategi, mengumpulkan informasi kekuatan lawan, hingga memimpin pertempuran bersenjata pada tanggal 16 Juni 1908. Perjuangan panjangnya yang berujung pada penangkapan dan pemenjaraan membuktikan dedikasi serta besarnya pengorbanan yang ia curahkan demi membela martabat tanah kelahirannya.

Dinamika penulisan sejarah mengenai peristiwa ini pun menghadirkan keberagaman perspektif antara arsip kolonial, tradisi lisan lokal, dan historiografi modern. Sumber-sumber kolonial cenderung membingkai peristiwa tersebut sebagai pemberontakan ekonomi semata (*opstand*) dengan mengabaikan figur Siti, sementara tradisi lisan dan karya akademik modern sukses merekonstruksinya secara heroik melalui ingatan kolektif, penyematan gelar "Singa Betina", serta penegasan perannya sebagai organisator. Melalui penelusuran sejarah Perang Belasting di Nagari Manggopoh pada tahun 1908, artikel ini membuktikan bahwa perjuangan Siti Manggopoh bukan hanya protes terhadap pajak penjajah, tetapi juga wujud nyata perlawanan berlandaskan adat, agama, dan pembelaan harga diri perempuan yang menempatkan perempuan sebagai pelaku penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhal, V. E. (2021a). Intertekstualitas Seni non-Susastra(Studi Kasus : Proses Hegemoni dan Politik Identitas dari Tugu Siti Manggopoh). *JSRW (Jurnal Seni Rupa Warna)*.

Afdhal, V. E. (2021b). Intertekstualitas Seni non-Susastra (Studi Kasus : Proses Hegemoni dan Politik Identitas dari Tugu Siti Manggopoh). *JSRW (Jurnal Seni RupaWarna)*.

Afrima, S., Melay, R., & Bunari. (2019). The Events of the War Manggopoh in the District Agam Sumatera Barat West Year 1908. *JOM FKIP*, *6*(1).

Budiman, M., & Kumalasari, D. (2026). Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter H. Abdul Manan dan Siti Manggopoh Dalam Perang Belasting Sebagai Sumber Belajar dalam Pelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*.

DDTCNews, R. (2019). *SITI MANGGOPOH: "Pajak Ini Menyalahi Adat."* DDTX News.

Fatimah, S. (2022). Siti Manggopoh: Women Warriors from the Coastal Land of Minangkabau in the 1908 Balasting War. *The 1st International Conference of Social Studies (ICSS)*, 174–196.

Harlina, N. (2020). *Mengunjungi Masjid Siti Manggopoh, Saksi Bisu Perang Belasting*.

Liputan 6. https://www.liputan6.com/regional/read/4337415/mengunjungi-masjid-siti-manggopoh-saksi-bisu-perang-belasting
Masyitah, Ibrahim, B., & Melay, R. (2019). The Kamang War in 1908 (The People's Movement Toward The Dutch). *JOM FKIP*, *6*(1).
Noer, A. (2025). *Profil Nagari Manggopoh di Kecamatan Lubuk Basung, Agam*. Ayosumbar.
Qoirunnisa, A., & Wahyuni, Y. S. (2025). Legitimasi Kekuasaan dalam Perspektif Max Weber pada Pemerintahan Kontemporer. *Journa Tranformation of Mandalika*, *6*(12).
Redactie. (1908a). De opstand op Sumatr's Westkust. *Het Volk : Dagblad Voor de Arbeiderspartij*.
Redactie. (1908b, September 4). Sumatra-bode. *Sumatra Bode & Tjaja Sumatra*. https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011126427
Sari, W. M. (2022). Nilai Penting Masjid Siti Manggopoh Kabupaten Agam, Sumatera Barat. *Hamsa: Jurnal Program Studi Arkeologi Universitas Jambi*, *1*(1).
Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
Suryo. (2022). *Perang Manggopoh, Bagian dari Perang Belasting di Sumatera Barat*. Merah Putih. https://www.merahputih.com/post/amp/perang-manggopoh-bagian-dari-perang-belasting-di-sumatera-barat